

DAFTAR PUSTAKA

- Ambaryati, Fransiska Vidiyana Dwi. 2016. "Peran Inspektorat Daerah dalam Membantu Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta." Thesis Gelar Master. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. "BPK Berikan Opini WTP atas LKPD DIY TA 2016." Diakses pada 20 Agustus 2017. <http://www.bpk.go.id/news/bpk-berikan-opini-wtp-atas-lkpd-diy-ta-2016>.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. "Opini WTP Tidak Menjamin Tidak Ada Korupsi." Diakses pada 22 Agustus 2017. <http://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-tidak-menjamin-tidak-ada-korupsi>.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2009. "Jika Laporan Bagus, Daerah dapat Bonus." Diakses pada 21 November 2017. <http://www.bpk.go.id/news/jika-laporan-bagus-daerah-dapat-bonus>.
- Badan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. 2017. "Peran Pemerintah Daerah, DPRD serta SKPD dalam Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)." Diakses pada 25 Agustus 2017. <http://bppkpd.com/2017/07/bimtek-peran-pemerintah-daerah-dprd-serta-skpd-dalam-mendapatkan-opini-wajar-tanpa-engecualian-wtp-oleh-badan-pemeriksa-keuangan-bpk/>.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, "Potret Akuntabilitas Keuangan Daerah di Jawa Tengah." Diakses pada 06 September 2017. <http://www.bpkp.go.id/%20jateng/konten/1912/Potret-Akuntabilitas-Kuangan-Daerah-di-Jawa-Tengah.bpkp>.
- Badara, Mu'azu Saidu. 2012. "The Role of Internal Auditors in Ensuring Effective Financial Control at Local Government Level: The Case of Alkaeri LGA." *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol. 3 No. 4.
- Bogdan, Robert C dan Biklen, Sari Knopp. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Bacon: Allyn dan Bacon, Inc.
- Budiardjo, Miriam. 1986. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Connolly, Ciaran dan Martin Kelly. 2011. "Understanding Accountability in SEOs." *Social Enterprise Journal*. Vol 7. No 3.

- Creswell, J.W., 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4 th. Ed. SAGE Publications, California.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2017. “Buku Tahunan TK Ditjen Perbendaharaan 2015 WTP Berhasil Diraih, Trust Semakin Meningkat.” Diakses pada 13 Desember 2017. <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/transformasi-kelembagaan/batik-tranf-kelembagaan-2/129-berita/nasional/2636-wtp-berhasil-diraih,-trust-semakin-meningkat.html>.
- Dharma, Rio Rizkita. 2014. “Pengaruh Pengawasan Fungsional dan Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Kota Pariaman.” Thesis Gelar Master. Jurnal Universitas Negeri Padang.
- Fombrun, C. 1996. *Reputation: Realizing Value from The Corporate Image*. Harvard Business School Press: Boston, MA.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartanto, Rima Vien Permata. 2015. “Peran Kepala Daerah dalam Membangun Daerah.” *Pkn Progresif*. Vol 10. No 1.
- Hayibor, S., Agle, B.R., Sears, G.J., Sonnenfeld, J.A., dan Ward, A. 2011. “Value Congruence and Charismatic Leadership in CEO – Top Manager Relationships: An Empirical Investigation.” *Journal of Business Ethics*. Vol 102. No 2.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016. Jakarta.
- Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. 2015. “Pemeriksaan Internal Berkala/Pemeriksaan Reguler.” Diakses pada 31 Desember 2017. <http://inspektorat.kulonprogokab.go.id/index.php?pilih=hal&id=8>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. “Wamenkeu: APIP Pegang Peran Penting Wujudkan Opini WTP LKPP.” Diakses pada 5 September 2017. <https://www.kemenkeu.go.id/Berita/wamenkeu-apip-pegang-peran-penting-wujudkan-opini-wtp-lkpp>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. “Antara APIP dan Opini WTP.” Diakses pada 4 September 2017. <https://www.kemenkeu.go.id/Artikel/antara-apip-dan-opini-wtp>.

- Kuangan Negara. 2016. "Masih Sedikit Pemda yang Konsisten Mempertahankan Opini WTP." Diakses pada 3 September 2017. <http://keuangan.co/masih-sedikit-pemda-yang-konsisten-mempertahankan-opini-wtp/>.
- Khairin, Fibriyani, Yoremia L. Ginting, dan Bramantika Oktavianti. 2015. "Profesi Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Masihkah Independensi Diperlukan? (Kajian terhadap Sudut Pandang Teori Peran)." Centro Multi Akuntansi, Samarinda, Universitas Mulawarman.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat DIY Tahun 2016.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) Tahun 2010.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) Tahun 2011.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) Tahun 2012.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) Tahun 2013.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) Tahun 2015.
- Lee, Sung Han. 2007. "CEO Reputation: Who Benefits – The Firm and The CEO?" Business Administration. University of Southern California.
- Lodico, Marguerite G., Spaulding, Dean T., dan Voegtle, Katherine H. 2006. "Method in Educational Research: From Theory to Practice." USA: Jossey-Bass, A Willey Imprint. www.Josseybass.com.
- Ludani MM, Gustaf Budi T, dan Jericho P. 2015. "Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan)." *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 2. No 29.
- Nasution, Darmin. 2017. Wawancara oleh Detik Finance. Jakarta, 26 Mei. Diakses pada 30 Agustus 2017. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3511917/laporan-keuangan-wtp-darmin-boleh-senang-tapi-jangan-puas>.

Pemerintah Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta. Diakses pada 26 September 2017. <http://web.jogjaprov.go.id/pemerintahan/kalender-kegiatan/view/visi-misi-tujuan-dan-sasaran>.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang DPPKA DI. Yogyakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2006.

Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara

Priyono, Wahyu. 2017. "Opini BPK dan Substansi Kinerja Pemerintah Daerah." *Keuangan Negara*. Vol 3. No 7.

Purba, Charles Bohlen. 2014. "Opini dan Status Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur." *Jurnal Akuntansi*. Vol. 18. No. 3.

Sanchez-Marin, Gregorio dan J. Samuel Baixauli-Soler. 2014. "CEO Reputation and Top Management Team Compensation: The Moderating Role of Corporate Governance." *Management Decision*. Vol 52. No 3.

Sekaran, Uma dan Bougie, R. 2013. *Research Methods for Business: Sixth Edition*. New Jersey: John Wiley and Sons, Ltd.

Simbolon, Anthon. 2006. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*, Edisi Revisi, Penerbit UGM, Yogyakarta.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Strauss, Anselm, dan Juliet Corbin. 2003. *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedures and Techniques*. Sage Publications, International.

Stanwick, P.A. dan Stanwick, S.D. 2003. "CEO and Ethical Reputation: Visionary or Mercenary?" *Management Decision*. Vol 41. No 10.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suparman. 2007. "Analisis Pengaruh Peran Kepemimpinan, Motivasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai."

Susetya, C.M. 2011. "Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern yang Efektif." Diakses pada 20 September 2017. <http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/77>.

Uma, sekaran. 1984. *Research Methods for Business*. Carbondale, Southern Illinois University.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Wade, J.B., Porac, J.F., Pollock, T.G. dan Graffin, S.D. 2006. "The Burden of Celebrity: The Impact of CEO Certification Contests on CEO Pay and Performance." *Academy of Management Journal*. Vol 49. No 4.

Wakhyudi. 2014. “Sinergi Pengawasan Untuk Mewujudkan Good Governance dan Clean Government.” Widyaiswara Madya Pusdiklatwas BPKP.

Winfrey, F.K. dan Logan, J.E. 1998. “Are Reputation and Power Compensating Differentials in CEO Compensation?.” *Corporate Reputation Review*. Vol 2. No 1.